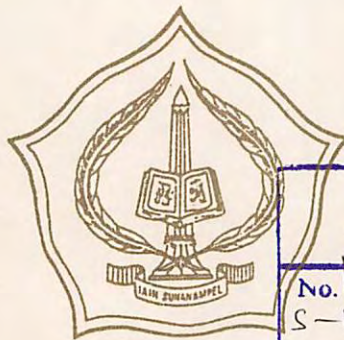


**TINDAK PIDANA PENGHINAAN
DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Perbandingan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
ujian akhir program sarjana strata satu
guna memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam
pada Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel



PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG
S-1995	S/1995/MJ/07
07.	ASAL BUKU :
MJ	TANGGAL :

Oleh

MOCHAMMAD FATHONI

NRP : 019000127

Dosen Pembimbing
H. A. Suhaimi Mustadjib, S.H.

Jurusan Mu'amalah Jinayah
FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

1995



NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 10 Januari 1995

H a l : Persetujuan Munaqasah Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah secara cermat kami baca / teliti kembali dan telah diadakan perbaikan / penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat, bahwa skripsi saudara :

N a m a : Mochammad Fathoni
N r p. : 019 000 127
Jurusan : Muamalah Jinayah
Judul : Tindak Pidana Penghinaan Ditinjau Dari
Segi Hukum Positif Dan Hukum Islam
(Studi Perbandingan)

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel. Untuk itu kami ikut mengharapkan agar dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing,

H. A. Soehaimi Mustadjib, S.H
NIP : 150 189 173

NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 26 Maret 1995

Hal : Perbaikan skripsi
Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami baca dan teliti kembali skripsi saudara :

Nama : M. Fathoni
N r p. : 019000127
Jurusan : Muamalah Jinayah
Judul : Tindak Pidana Penghinaan Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

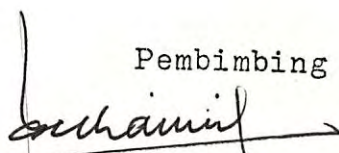
ternyata telah diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan keputusan sidang ujian munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1995.

Dengan demikian, kami harap agar dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing



(H.A. Spohaimi Mustadjib, S.H)

NIP. : 150 189 173

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
" SUNAN AMPEL "
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA

P E N G E S A H A N

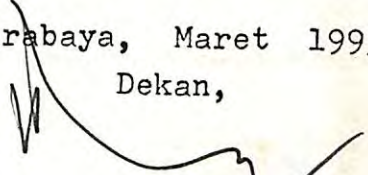
Skripsi ini telah dipertahankan di dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, pada :

H a r i : Selasa
Tanggal : 31 Januari 1995

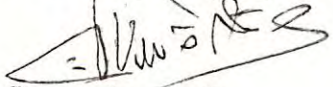
dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat ujian akhir program strata satu (S-1) guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, dengan catatan : mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan memperbaiki dan menyempurnakan lebih lanjut sesuai dengan keputusan sidang.

Maka setelah Pembimbing meneliti perbaikan/penyempurnaan tersebut, dengan ini kami mengesahkan hasil ujian Munaqasah di atas.

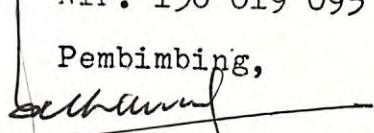
Surabaya, Maret 1995
Dekan,


Drs. H. Kuslan, M.A
NIP. 150 015 043

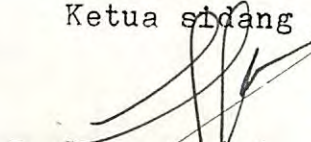
P e n g u j i,


Djuwoto, S.H
NIP. 150 019 095

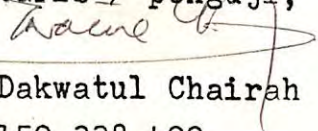
Pembimbing,


H.A. Soehaimi Mustadjib, S.H
NIP. 150 189 173

Sidang ujian Munaqasah :
Ketua sidang / penguji ,


Drs. Saparlan
NIP. 150 013 213

Sekretaris / penguji,


Dra. Dakwatul Chairah
NIP. 150 228 499

B A B II

PENGHINAAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM

A. 1. Pengertian Penghinaan Menurut KUHP

Delik penghinaan merupakan kejahatan yang banyak ragamnya dalam KUHP, yang diatur dalam pasal - pasal yang berbeda - beda pula. Namun dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, definisi penghinaan itu tidak ada rumusan yang jelas dan tegas, akan tetapi penulis berusaha untuk mencari pengertian yang sebenarnya dari penghinaan menurut KUHP. Ini tentu tidak lepas dari hasil perbandingan dari berbagai pendapat ahli hukum pidana. Sedangkan penghinaan itu diatur dalam bab XVI buku II KUHP. (antara pasal 310 - 321 KUHP)

Menurut pengertian umum bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat dari serangan ini biasanya penderita akan merasa malu. (R. Sugandhi, S.H, 1981, 330).

Pengertian tersebut di atas juga sama dengan yang telah diutarakan oleh R. Soesilo bahwa penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik orang. Sedangkan kehormatan yang diserang ini hanyalah mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia baik dan bukan kehormatan dalam bidang seksual dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. (R. Soesilo, 1984, 157).

Jadi penghinaan itu adalah menyerang nama baik dan

dalam pasal - pasal yang berbeda - beda. Hal ini memang disebabkan adanya perbedaan sifat dan obyek dari penghinaan itu sendiri. Pasal - pasal penghinaan dan fitnahan yang obyeknya selain manusia perorangan itu tersebar dalam bab - bab yang berbeda. Sedangkan pasal - pasal penghinaan yang obyeknya manusia perorangan itu sebagai berikut di bawah ini :

Pasal 310 ayat 1

Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan - dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp.4.5000,-

Pasal 310 ayat 2

Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum selama - lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 4.500,-.

Pasal 310 ayat 3

Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau terpaksa untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Pasal 311 ayat 1

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan

penghinaan yang diantara ahli hukum tidak sama dalam mem - bagi macam - macam tersebut.

Menurut R. Soesilo, penghinaan itu dibedakan menjadi enam macam yaitu :

1. Menista
2. Menista dengan surat
3. Memfitnah
4. Penghinaan ringan
5. Mengadu secara memfitnah
6. Menuduh secara memfitnah

Akan tetapi ahli hukum yang lain diantaranya Brig. Jemd. Drs Moch. Anwar, S.H. mengatakan bahwa penghinaan yang merupakan kumpulan dari berbagai jenis kejahatan terhadap kehormatan orang, itu ada lima macam yaitu :

1. Menista secara lisan
2. Menista secara tulisan
3. Memfitnah
4. Mengadu secara memfitnah
5. Menuduh secara memfitnah

Dengan adanya perbedaan pendapat dalam hal pembagian penghinaan tersebut, maka penulis akan menjelaskan mengenai bentuk penghinaan yang dibagi menjadi enam macam, Karena dengan menjelaskan yang enam macam tersebut maka sekaligus juga akan terjelaskan bentuk penghinaan yang lima macam.

Macam - macam bentuk penghinaan tersebut sebagai berikut :

a. Menista yang dalam bahasa asingnya "smaad" tersebut dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. itu mempunyai unsur - unsur yaitu :

- 1) Sengaja menyerang nama baik dan kehormatan orang lain dengan,
- 2) Menuduh sesuatu perbuatan yang tertentu dan
- 3) Dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan hal itu pada orang banyak.
- 4) Semuanya ini dilakukan dengan lisan, dan apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar maka dinamakan "menista dengan surat" sebagaimana tercantum dalam pasal 310 ayat 2 KUHP. (R. Soesilo, 1984, 158).

b. Penistaan dengan tulisan atau gambar

Penistaan dengan tulisan ini juga disebut dengan penistaan dengan surat yang dalam bahasa asingnya "smaad - schrift". Ini terdapat dalam pasal 310 ayat 2 KUHP. Unsur - unsur penistaan dengan surat ini sama dengan penistaan dengan penistaan dengan lisan, akan tetapi ditambah dengan unsur "penistaan itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan". Apabila pelaku tidak bermaksud untuk menyiarkan dan mengumumkan, maka tidak terkena pasal ini. (Brig. Jend. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, S.H., 1989, 138).

Dalam pencemaran dengan surat ini seringkali berhubungan dengan pers sebagai media cetak yang sering memberitakan tentang keadaan seseorang. Agar dapat terkena jaringan delik pers, maka haruslah memenuhi kriteria - kriteria, yaitu :

hal sebenarnya ia tidak melakukannya. Mungkin juga barang tersebut berupa barang selundupan atau sebuah senjata yang baru digunakan membunuh orang yang secara diam - diam diletakkan di rumah orang sehingga penghuni rumah itu tuduh yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

4. Tujuan diadakannya larangan hukuman

Setelah kami sebutkan pasal - pasal yang mengatur tentang perbuatan penghinaan sebagaimana tercantum dalam KUHP, maka perlu kiranya kami jelaskan tentang maksud dan tujuan diadakannya larangan penghinaan agar lebih jelasnya maksud dicantumkan pasal - pasal tersebut dalam KUHP bagi yang melanggar larangannya.

Menghina merupakan salah satu perbuatan pidana, oleh karena itu kita tidak akan dapat melepaskan antara tujuan diadakannya larangan penghinaan dengan tujuan hukum secara khusus. Maka disini akan kami jelaskan tujuan hukum pada umumnya dan tujuan hukum secara khusus.

Berkenaan dengan tujuan hukum tersebut maka ada beberapa pendapat sarjana ilmu hukum yang diantaranya : Prof. Subekti, S.H mengatakan bahwa hukum itu bertujuan untuk melayani negara dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan keadilan itu selalu mengandung unsur penghargaan, penilaian dan pertimbangan. Oleh karena itu keadilan menurutnya adalah bahwa dalam keadaan yang sama

setiap orang itu haruslah menerima bagian yang sama pula .
(Drs. Kansil, S.H, 1986, 41).

Sedangkan menurut Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H ,
bahwa tujuan hukum itu dititik beratkan pada perlindungan
antara dua kepentingan yakni antara kepentingan individu -
dan kepentingan masyarakat yang keduanya itu harus serasi
selaras dan seimbang. Apabila hal ini dapat terwujud maka
masyarakat akan menjadi aman, tentram dan damai. (Drs. Su -
darsono, S.H, 1991, 63).

Disamping tujuan - tujuan yang telah tersebut di a-
tas maka Van Hamel menyatakan bahwa tujuan pidana itu kom-
binasi yakni untuk menakut - nakuti, memperbaikinya dan un-
tuk membinasakan terhadap suatu kejahatan tertentu. (Bam -
bang Poernomo, S.H, 1985, 31).

Dari pendapat - pendapat para sarjana tersebut maka
daoat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur
pergaulan hidup secara damai, tenang, tentram dan tertib ,
dan bebas dari kekhawatiran dan kecemasan dan adanya kese-
imbangan antara dua kepentingan yaitu kepentingan individu
dan kepentingan masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur serta bahagia.

Oleh karena itu menghina adalah merupakan suatu ke-
jahatan yang dilarang dalam KUHP. Maka berdasarkan uraian
yang tersebut di atas bahwa tujuan diadakannya larangan
penghinaan adalah sama dengan tujuan diadakannya hukum pi-

dana atau hukuman yaitu untuk memberi balasan bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Dan juga untuk mencegahnya dari timbulnya perbuatan - perbuatan pidana dan khususnya terhadap tindak pidana penghinaan. Maka tujuan itu adalah untuk menakut - nakuti bagi orang lain agar tidak melakukannya. Disamping itu juga untuk memperbaiki diri si terhukum dengan cara mendidiknya pada waktu dia menjalani hukuman, sehingga ia dapat kembali ke masyarakat dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik serta tidak mengulangi lagi kejahatan penghinaan yang pernah dilakukannya. Dengan begitu diharapkan akan timbul suatu kesadaran bahwa akibat penghinaan yang ia lakukan itu dapat mengganggu ketenangan dan ketentraman masyarakat setiap anggota masyarakat, terutama bagi si korban penghinaan tersebut.

Disamping itu agar kehormatan dan nama baik setiap individu dalam masyarakat dapat terjamin dan masyarakat merasa tenang serta bebas dari kekhawatiran dan ketakutan dalam bergaul dengan masyarakat yang lain. Karena kita tahu bahwa kehormatan dan nama baik tiap individu itu dilindungi oleh Undang - Undang. Oleh karena itu untuk menjaga dan mempertahankan kehormatan dan nama baik itu maka diadakanlah larangan penghinaan sebagaimana yang telah tercantum dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Dengan begitu ketertiban dalam masyarakat dapat dipertahankan kelestariannya dan kejahatan penghinaan tidak timbul secara bertebaran di kalangan masyarakat.

Sedangkan menurut Abdul Qadir 'Audah bahwa tujuan syari'at Islam mewajibkan adanya pidana bagi orang yang melanggar hukum Allah adalah untuk memperbaiki keadaan manusia serta menjaga mereka dari kerusakan dan menunjukkannya ke arah yang tidak menyesatkan dan mencegah dari maksiat dan mengajak mereka untuk taat dan menyelamatkan dari kebodohan. (Abdul Qadir 'Audah, 1992, 609).

A. Hanafi, M.A mengatakan bahwa tujuan pokok dari penjatuhan hukuman pidana dalam hukum Islam adalah untuk mencegah atau pencegahan (Ar Ra'du waz zajru) dan pendidikan serta pengajaran. (A. Hanafi, M.A, 1986, 225). Pencegahan disini dimaksudkan untuk menahan si pembuat agar tidak mengulangnya dan tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut, disamping itu juga untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah tersebut. Selain untuk mencegah dan menakut nakuti maka syari'at Islam juga memberikan perhatian terhadap si pembuat yakni dengan memberi pelajaran dan mengusahakan agar mereka menjadi orang yang baik. Ini merupakan tujuan inti. Selain kebaikan si pembuat, syari'at Islam dalam menjatuhkan pidana juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh penguasa yang saling menghormati dan mencintai diantara anggotanya dengan mengetahui batas - batas hak dan kewajibannya. Karena pada hakekatnya, perbuatan pidana adalah merupakan perbuatan yang tidak disenangi oleh masyarakat dan menginjak - injak keadilan yang didambakan oleh

but dalam pasal 35 no. 1 - 3 yaitu KUHP., pasal 312, 316, 319 488. Hal - hak itu sebagai berikut :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hal memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan - ketentuan umum.

Pasal 315

Pembuat diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 4.500,-, apabila dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau tulisan maupun di hadapan orang itu sendiri dengan lisan atau tulisan yang diterimakan kepada orangnya .

Pasal 316

Pembuat hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman yang telah ditentukan di atas, apabila kejahatan ini dilakukan terhadap seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaannya secara sah.

Pasal 317

Pembuat diancam dengan pidana penjara selama - lamanya 4 tahun, atau pencabutan sebagaimana yang tersebut pada pasal 35 no 1 - 3.

Pasal 318

Pembuat diancam dengan hukuman penjara selama - lamanya 4 tahun, apabila ia melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara palsu disangka telah melakukan suatu

ngenai alasan - alasan penghapus pidana di atas, akan tetapi bahasan kali ini kami cukupkan untuk menerangkan tentang hal - hal yang menghapuskan hukuman yang berhubungan - dengan masalah penghinaan sebagaimana yang dibahas dalam skripsi ini.

Jadi yang dimaksud dengan alasan -alasan yang menghapuskan hukuman dalam sub bab ini adalah alasan - alasan yang menghapuskan atau meniadakan hukuman yang terdapat dalam pasal 310 ayat 3 KUHP. Walaupun begitu, bahasannya nanti tidaklah dapat melepaskan dari alasan - alasan penghapus pidana yang lain. Oleh karena itu, dengan berdasar pembagian tersebut di atas, maka pasal 310 ayat 3 KUHP itu termasuk ke dalam alasan penghapus pidana yang hanya berlaku terhadap delik - delik yang tercakup dalam penghinaan secara khusus. (Bambang Poernomo, S.H., 1985, 191).

Ada dua hal yang dapat menghilangkan sifat melanggar hukum dari penistaan atau penghinaan sehingga si pelaku tidak dikenakan pidana atau hukuman. Dua hal tersebut yaitu :

1. Adanya kenyataan bahwa si pelaku dalam menyampaikan tuduhan yang bersifat menghina ini demi untuk kepentingan umum.
2. Karena mutlak perlu untuk membela diri tentang sesuatu. (M. Sudradjad Bassar, S.H., 1986, 149).

Jadi orang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhnya melakukan suatu perbuatan ter-

tentu, dengan maksud untuk menyebarkan atau disiarkan melalui tulisan, maka ia tidak dapat dituntut hukuman jikalau - pun perbuatan yang dilakukan itu ternyata demi untuk kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Oleh karena itu jika ada tuntutan terhadapnya, maka keputusan Hakim harus berbunyi " bebas dari tuntutan " (*outstg van recht svervolging*). (Mr. R. Tresno, tt , 167).

Sekarang mengenai patut atau tidaknya pembelaan untuk kepentingan umum dan terpaksa membela diri yang diajukan oleh tersangka itu terletak pada pertimbangan Hakim. Hakim baru akan mengadakan pemeriksaan apakah penghinaan itu benar - benar dilakukan oleh terdakwa karena terdorong untuk membela kepentingan umum atau untuk membela diri, jika terdakwa meminta untuk diperiksa. Hal ini sesuai pasal 312 KUHP. Mengenai benar atau tidaknya pembelaan demi kepentingan umum atau untuk membela diri itu merupakan hasil dari analisa terhadap tuntutan Jaksa dan pertimbangan Hakim. Apabila pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh Hakim sedangkan dalam pemeriksaan ternyata apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka tidak dipersalahkan karena menista lagi, akan tetapi ia terkena pasal 311 KUHP . (R. Soesilo, 1992, 226).

Sebaliknya menurut pasal 313 KUHP. bahwa kesempatan pembuktian seperti itu tidak diperkenankan apabila menyangkut delik aduan, sedang yang merasa kehormatan atau nama baiknya tercemar tidak mengadakan tuduhan itu.

Apabila dalam kesempatan pembuktian itu ternyata yang dituduhkan itu tidak terbukti, maka terdakwa tidak dapat dikenakan tuduhan memfitnah, akan tetapi wajib dibebaskan. Hal ini sesuai dengan pasal 314 ayat 1 KUHP.

Dalam hal ini dapat kami berikan suatu contoh kasus yaitu

Pada saat menjelang Pemilu 1977, telah terjadi sebuah peristiwa yakni beberapa orang yang pada waktu pemeriksaan Polisi, mereka telah melakukan perbuatan yang dengan sengaja di muka umum telah melakukan penodaan terhadap agama Islam yang dilakukan melalui sumpah dengan cara mengencingi, menginjaki serta mengentuti Kitab Suci Al Qur'an. Lalu oleh Jaksa sebagai penuntut umum, mereka dituntut dengan hukuman masing - masing selama satu tahun penjara dengan potongan masa tahanan, dan harus membayar semua ongkos perkara.

Terjadinya peristiwa tersebut disebabkan karena terdakwa telah dituduh melakukan perobekan terhadap tanda gambar GOLKAR. Pada waktu pemeriksaan, mereka didesak untuk mengakui perbuatannya, akan tetapi ia mengelak dan mengatakan bahwa ia tidak melakukan penyobelan tersebut. Kemudian Dansek (Tajuddin) menyuruh mereka mengaku, kalau tidak mau, maka ia disuruh mengencingi, menginjaki dan mengentuti Al - Qur'an. Hal ini juga dengan ancaman bahwa jika tidak melakukan, maka ia akan ditahan lebih lama. Dengan sebab inilah mereka terpaksa melakukan apa yang diperintahkan oleh Dansek tersebut, yang disaksiakan oleh beberapa pemeriksa yang

Unsur - unsur yang dimaksud dalam pasal 156 a. KUHP. antara lain adalah :

- 1) Dengan sengaja
- 2) Di muka umum
- 3) Perbuatan penodaan terhadap agama

Ke tiga unsur tersebut semuanya telah terpenuhi pada kasus di atas. Akan tetapi fakta menu njukkan bahwa terdakwa bertindak demikian itu karena adanya daya paksa , yang dilakukan karena sumpahnya. Sebab ia takut ditahan terus - menerus oleh Polisi, sehingga ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Dansek tersebut.

Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa itu memang terbukti dengan jelas, akan tetapi dengan adanya pasal 48 KUHP., maka demi keadilan, terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan karenanya juga harus dibebaskan dari biaya perkara.

Dalam kasus di atas yang berkenaan dengan bahasan ini adalah mengenai hal - hal yang menghapuskan hukuman . Oleh karena itu alasan pemaaf yang tercantum dalam pasal 48 KUHP. itu lebih tepat jika diterapkan dalam kasus ini.

pencabutan hak - hak tertentu seperti hak untuk menjadikan saksi buat selama - lamanya, serta diat atau denda dan ta' - zir yaitu berupa (terhadap) delik penghinaan yang tidak diatur oleh Al Qur'a n dan Hadits. Disamping itu juga ada hukuman yang menjadi hak Allah seperti hukuman had bagi pe - nuduh zina yang muhshon.

Dari sini dapat diketahui bahwa sanksi yang diterap - kan oleh Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana penghinaan itu lebih berat dan lebih representatif daripada hukuman yang diterapkan oleh Hukum Pidana Positif. Sebab de - ngan adanya hukuman penjara atau denda sebagaimana yang terdapat dalam KUHP. itu kiranya kurang dapat mengenai sa - sarannya. Dan bahkan hukuman penjara itu tidak membuat nara pidana menjadi lebih baik bahkan mungkin karena ringannya hukuman yang ada dalam KUHP. tersebut maka akan membuat o - rang mudah melakukan penghinaan. Sehingga hukuman itu tidak membuat jera bagi para pelakunya.

Di samping itu hukuman yang ada dalam KUHP. tersebut tidaklah konsisten. Sebab, walaupun besarnya hukuman penjara namun dendanya masih tetap sama. Hal ini dapat dilihat pada pasal 310 ayat 1 tentang pencemaran secara lisan dengan pa - sal 310 ayat 2 tentang pencemaran secara tertulis. Padahal pencemaran secara tertulis itu lebih berbahaya daripada pen - cemaran dengan lisan. Tetapi kenapa besarnya denda kok sama? Dan seharusnya besarnya denda itu berlainan sesuai dengan beratnya hukuman penjara yang diterapkan.

Artinya :

" Barangsiapa yang kafir terhadap Allah, sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar". (DEPAG RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 1989, 418).

Dan juga berdasarkan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

الضرورة تبين المحظورات

Artinya : " Keadaan darurat itu membolehkan hal yang dilarang ". (M. Hasby Ash Siddiqi, 1975, 196).

Kesimpulannya bahwa keputusan Majelis Hakim tentang terdakwa yang dibebaskan dari segala tuntutan hukuman serta melimpahkan semua biaya perkara kepada negara adalah sudah tepat dan sesuai dengan falsafah Hukum Islam. Hal ini disebabkan karena dalam diri terdakwa terdapat hal - hal yang dapat menghilangkan hukuman yaitu adanya daya paksa .

yang tidak terdapat dalam ketentuan Hukum Pidana Positif (KUHP). Di samping itu, hukuman yang ada dalam KUHP. itu terlalu ringan, sehingga akan mempermudah para penjahat untuk melanggar larangan tersebut, bahkan akan meningkatkan teknik jahatnya. Dan sanksi yang ada dalam KUHP. itu tidak konsisten. Karena denda antara pencemaran dengan lisan itu sama besarnya dengan denda pada pencemaran tulisan. Padahal pencemaran dengan tulisan itu lebih berbahaya daripada pencemaran dengan lisan.

Tentang hal - hal yang menghilangkan hukuman, Hukum Pidana Islam itu lebih adil dan lengkap. Karena alasan demi membela kepentingan umum atau untuk membela diri itu tidak hanya terhadap delik penghinaan saja, akan tetapi juga terhadap delik - delik (jarimah - jarimah) yang lain.

B. Saran - Saran

Setelah penulis mengadakan pembahasan tentang masalah penghinaan dalam KUHP. menurut Hukum Pidana Islam dalam skripsi ini, maka penulis menyarankan kepada :

1. Para ahli hukum (selain hukum Islam) serta masyarakat pada umumnya untuk mempelajari dan memperdalam Hukum Pidana Islam, agar tidak terjadi kesalahfahaman baik yang menyangkut masalah perdata maupun pidana, dengan mengadakan perbandingan , mana yang lebih adil dan lebih benar

untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam.

2. Para penegak hukum khususnya, hendaklah selalu menjaga ketertiban dan ketentraman serta di dalam masyarakat.
3. Para ahli hukum Islam dan kaum muslimin pada umumnya dituntut oleh Tuhan, agar melaksanakan Syari'at Islam dalam kehidupan di dunia ini, sehingga tercapai suatu kehidupan masyarakat yang adil, makmur, tenteram, selamat, dan sejahtera di dunia dan akhirat nanti, Amien.....

